
Stadsplanning van het Centrum van Blitar: Perkembangan Pusat Kota Blitar 1869-1933

¹Rendy Wahyu Satriyo Putro

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

*Correspondence Author: rendy.putro@lecturer.unpatti.ac.id

Abstrak: Blitar merupakan daerah yang memiliki peran penting sejak zaman kerajaan-kerajaan Kuno Nusantara menjadi magnit pembangunan hingga dilirik menjadi *gemeente* bahkan pernah akan dijadikan sebagai karisidenan pada masa Hindia Belanda. Alun-alun menjadi pusat kota sesuai dengan tata kota Islam era Mataram dan berkembang menjadi pusat *Gemeente* Blitar, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Penelitian ini berfokus meneliti tata ruang pusat kota Blitar pra *Gemeente* Blitar dan perkembangannya dari tahun 1869 hingga tahun 1933 dengan ditandai masuknya listrik di Blitar. Penelitian ini menggunakan metodologi historis dengan empat langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kendala utama yang dihadapi adalah kelangkaan dan keterbatasan dokumen. Melalui dokumentasi visual dan analisis sumber, penelitian ini memetakan dinamika kota Blitar sebagai pusat sosial, ekonomi, dan budaya di Karisidenan Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perkembangan tata kota seiring dengan perkembangan zaman. Alun-alun tetap bertahan menjadi pusat kota, dan beberapa fungsi bangunan berubah dan berkembang sesuai kebutuhan zamannya, termasuk infrastruktur perhubungan jalan baik jalan raya maupun jalan kereta api, telekomunikasi, pusat perekonomian, dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Stadsplanning, Centrum, Kota Blitar*

Abstract: Blitar has played a significant role since the era of the ancient Nusantara kingdoms, evolving into a focal point of development and attracting attention as a *gemeente*, with plans at one time to make it a residency under Dutch colonial rule. The city square, or alun-alun, served as the town center, based on Islamic urban planning principles from the Mataram era, and grew into the center of *Gemeente* Blitar, both economically and socio-culturally. This research examines the spatial planning of Blitar's city center before the establishment of *Gemeente* Blitar and its development from 1869 to 1933, marked by the introduction of electricity in Blitar. The study employs a historical methodology with four steps: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. A primary challenge in the research was the scarcity and limited availability of documents. Through visual documentation and source analysis, the study maps the dynamics of Blitar as a social, economic, and cultural center in the Kediri Residency. Findings indicate that urban planning evolved with the times; the alun-alun remained central, while building functions adapted and expanded according to contemporary needs, including transportation infrastructure (roads and railways), telecommunications, economic centers, and public facilities to meet community needs.

Keywords: *Stadsplanning, Centrum, Blitar City*

Pendahuluan

Blitar merupakan wilayah yang memiliki peran penting sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa Kuno. Salah satu bukti tersebut adalah dengan banyaknya temuan-temuan situs purbakala yang tersebar di wilayah Blitar raya. Kawasan situs purbakala terbesar di Jawa Timur yang sudah muncul ditemukan adalah kawasan situs candi Palah Penataran. Candi Penataran merupakan candi istana utama Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (Munoz, 2009). Candi Penataran merupakan titik kulminasi dari ziarah tahunan sang raja setelah perayaan festival Caitra. Setelah Caitra, Hayam

Wuruk selalu melakukan lawatan ke Blitar dengan pergi ke Penataran, Lodaya (kemungkinan di candi Bacem daerah Sutojayan yang juga dinamakan sebagai Lodoyo), dan ke candi Simping (Sumberjati) di mana diperabuan raja pertama Majapahit yaitu Raden Wijaya, hal ini dikenal dengan istilah "Srada" atau dikenal pada saat ini dengan istilah "nyadran" (kirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal).

Pada Era Kesultanan Mataram wilayah Blitar juga memiliki peran penting yang merupakan wilayah perbatasan paling timur dari Kesultanan Mataram. Salah satu peninggalan tradisi Kesultanan Mataram yang

masih lestari hingga kini yaitu tradisi upacara siraman pusaka Gong Kyai Pradah di Lodoyo yang letaknya tidak jauh dari situs candi Lodoya (candi Bacem) era Majapahit. Hingga awal abad ke-20 pun juga di Blitar terutama di pusat kota juga terdapat tradisi gladiator ala Jawa, yaitu Rampogan Macan yang diadakan di alun-alun Blitar yang kini sudah punah dengan dilindunginya binatang harimau. Selain itu juga terdapat makam proklamator Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno yang selalu ramai diziarahi masyarakat sampai sekarang.

Selain situs-situ bersejarah tersebut, yang menjadi magnet Blitar adalah Gunung Kelud yang sering meluapkan laharnya ke wilayah Blitar. Alhasil Blitar memiliki wilayah yang subur untuk pertanian dan perkebunan. Sehingga sejak berakhirnya perang Diponegoro dengan adanya kebijakan *Cultuurstelsel* 1830 merubah wajah Blitar yang sebelumnya daerah pedalaman dengan kawasan hutan menjadi daerah-daerah perkebunan produktif beserta pabrik pengolahannya. Perkebunan dan pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan tersebut hingga kini masih banyak ditemukan, ada yang masih memproduksi maupun hanya tinggal puing-puing bekas bangunannya semenjak ditinggal Belanda.

Perkembangan perkebunan dan pabrik pengolahan hasil perkebunan di Blitar juga menjadikan Blitar berkembang dengan pesat terutama berkaitan dengan pembukaan akses jalan, sarana dan prasarana, telekomunikasi dan transportasi guna mendukung pertumbuhan industri perkebunan yang dibuka di Blitar. Penerapan *Cultuurstelsel* yang memberikan dampak sangat signifikan kepada Kerajaan Belanda yaitu dengan berkembang pesatnya perdagangan Belanda dan surplusnya pendapatan kas Kerajaan Belanda. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi rakyat negeri jajahan Hindia Belanda yang jauh dari kata sejahtera. Orang-orang Belanda pun banyak yang mengkritik kebijakan *Cultuurstelsel*, salah satu yang terkenal adalah Van Deventer yang mengkritik tentang tanggung jawab moral negeri Belanda terhadap dampak *Cultuurstelsel* bagi penduduk pribumi. Lahirlah kebijakan Politik Etis yang membuka mata Kerajaan Hindia Belanda untuk lebih memperhatikan

nasib penduduk pribumi yang masih terbelakang. Hal tersebut dikenal dengan Trias Van Deventer, dengan 3 program utama yaitu pembangunan irigasi, emigrasi, dan edukasi di negeri jajahan Hindia Belanda.

Pembangunan Hindia Belanda dengan adanya kebijakan politik etis adalah bersifat sentralisasi, yang mana pembangunan diatur dan dijalankan oleh pusat pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang semakin luas dan ambisi pembangunan di seluruh wilayah Hindia Belanda dengan berbagai persoalan daerah yang semakin kompleks. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan tidak meratanya pembangunan di Hindia Belanda. Hal inilah yang mendorong munculnya pembangunan yang bersifat desentralisasi dengan pendistribusian kewenangan kekuasaan kepada pemerintah lokal, maka diterbitkanlah Undang-Undang Desentralisasi 1903. Salah satu dampak dari Undang-Undang Desentralisasi 1903 adalah banyak lahir kota-kota pemerintahan yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. Salah satu kota praja yang lahir adalah *Gemeente* Blitar, yang merupakan salah satu dari deretan *gemeente* yang awal dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda di seluruh wilayah Hindia Belanda. Menarik dikaji adalah apa yang menjadi alasan Pemerintah Hindia Belanda membentuk *gemeente* di Blitar bahkan sebagai deretan *gemeente* pelopor awal yang dibentuk serta perkembangan pembangunan *gemeente* di tengah kekuasaan Kadipaten Blitar yang sudah memiliki tata kota.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau historiografi yang memiliki 4 langkah penelitian. Langkah pertama adalah metode heuristik, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji. Dalam hal ini dilakukan penelusuran arsip-arsip yang mendukung dan studi literatur ilmiah dari berbagai pustaka maupun jurnal ilmiah. Selain itu, untuk mendapatkan arsip-arsip zaman kolonial Hindia Belanda, tim peneliti banyak mencari arsip baik berupa foto maupun peta dari arsip *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en*

Volkenkunde (KITLV) Universiteit Leiden Belanda dalam bentuk digital.

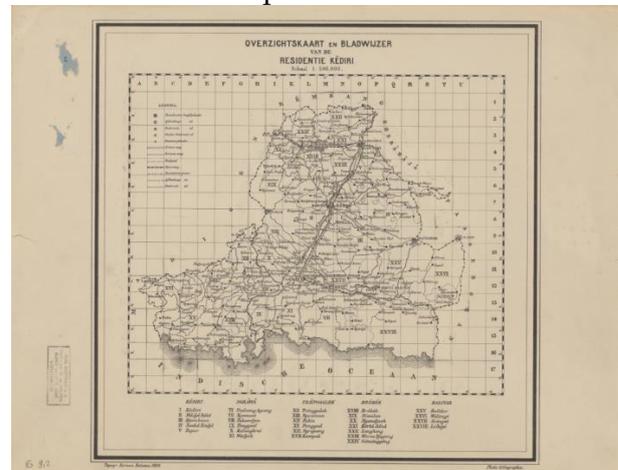
Langkah kedua adalah kritik sumber (verifikasi data), baik kritik internal maupun eksternal. Pada tahap ini, kendala yang dialami tim peneliti adalah pencocokan sumber data sejarah Blitar—terutama dari arsip foto bangunan maupun jalan—banyak yang mengalami perubahan pada masa kini. Terdapat perubahan gedung-gedung yang terdapat dalam foto arsip temuan, baik direnovasi maupun dileburkan dan diganti bangunan baru. Sehingga, kebenaran letak, bangunan yang terdapat di arsip dan pada kenyataan hari ini masih menjadi kajian. Hal yang masih sulit dicari dan ditembus oleh tim peneliti adalah data berupa arsip *Staatsblad van Nederlandsche Indie* yang di dalamnya menjelaskan tentang keputusan pembentukan *Gemeente* Blitar maupun *Residentie* Blitar pada awal abad ke-20. Selain itu tim peneliti juga sangat berhati-hati dengan berbagai tulisan yang mengkaitkan hal tentang Blitar zaman Hindia Belanda yang banyak bertebaran. Tim peneliti selalu melakukan kritik sumber sajian data dengan sangat hati-hati sebelum melakukan interpretasi.

Langkah ketiga adalah interpretasi (analisis) dan sintesis terhadap fakta yang diperoleh. Dari beberapa data yang diperoleh, langkah terpenting yang dilakukan tim peneliti adalah menganalisis temuan data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti. Butuh kecermatan yang tinggi dalam menganalisis suatu sumber sejarah terutama dalam kaitannya antar satu sumber dengan sumber lain. Kendala peneliti salah satunya adalah terdapat beberapa potongan sejarah yang mana tim peneliti berusaha untuk menyambungkan potongan-potongan sejarah tersebut menjadi satu kesatuan. Langkah keempat adalah historiografi (penelitian sejarah), yaitu dengan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Wilayah Blitar Pra *Gemeente van Blitar* (1868-1875)

Blitar secara administrasi merupakan bagian dari Karisidenan Kediri, yang terdiri dari wilayah Kediri, Ngrawa (Tulungagung sekarang), Trenggalek, Brebek (Nganjuk sekarang), dan Balitar (Blitar sekarang). Untuk memahami bagaimana pusat kota Blitar pada zaman Hindia Belanda, salah satu sumber rujukan adalah dengan menelisik peta zaman tersebut. Terdapat dua temuan peta tertua sejak abad ke-19 yang dibuat oleh Dinas Topografi Pemerintah Hindia Belanda. Peta topografi tersebut merupakan peta dari hasil survei dan pemetaan Dinas Topografi Pemerintah Hindia Belanda secara periodik, yaitu pada tahun 1869 hingga tahun 1875 dan ditetapkan sesuai keputusan Pemerintah Hindia Belanda nomor 8 tanggal 6 Juli 1869 berlaku hingga tahun 1875. Membahas Blitar, secara global terdapat peta topografi Karisidenan Kediri, sedangkan peta hasil survei dan pemetaan¹ secara spesifik dibagi menjadi lembaran peta yang lebih spesifik. Berikut ini adalah 2 peta tersebut:



Gambar 1. D G 9 2 *Overzichtskaart en bladwijzer van de Residentie Kediri* (Peta Ikhtisar dan bookmark Karisidenan Kediri), herdruk (dicetak kembali) 1893

Sumber: *Kaart van de Residentie Kediri, opgenomen ingevolge Gouvernements besluit d.d. 6 juli nr.8 in de jaren 1869 tm 1875* (KITLV Digital).

¹ Peta hasil survei dan pemetaan berlaku secara periodik dan masih tetap digunakan sebelum ada pembaruan secara periodik, pada saat ini survei dan pemetaan Indonesia dilaksanakan oleh Bakorsurtanal.



Gambar 2. D G 10 34 Balitar Kaart van de Residentie Kediri, herdruk (dicetak kembali) 1892

Sumber: Balitar Kaart van de Residentie Kediri, opgenomen ingevolge Gouvernements besluit d.d. 6 juli nr.8 in de jaren 1869 tm 1875 (KITLV Digital).

Peta gambar nomor 1 adalah peta Karisidenan Kediri yang meliputi *regentschap* (kabupaten) dan *gemeente* (kotamadya) di wilayah Karisidenan Kediri, yang terdiri dari wilayah Kediri, Ngrawa (Tulungagung sekarang), Trenggalek, Brebek (Nganjuk sekarang), dan Balitar (Blitar sekarang). Sedangkan gambar peta nomor 2 adalah lembaran peta nomor P 12 yang menggambarkan wilayah pusat kota Blitar dari peta pemetaan 1869-1875 yang diterbitkan kembali tahun 1892. Dari kedua peta tersebut dapat dilihat bahwa Blitar dibagi menjadi 4 distrik, yaitu Balitar, Welingi, Srengat, dan Ledaja (Lodaya) (Blitar Selatan, yang hingga kini pun Lodaya masih digunakan sebagai penamaan wilayah, yaitu Lodaya Barat dan Lodaya Timur).

Pusat Kota Blitar Pra *Gemeente* van Blitar (1968-1875)

Membahas pusat kota Blitar tidak akan lepas dengan tata kota Islam zaman Kesultanan Mataram yang diterapkan di berbagai kota wilayah Kesultanan Mataram, salah satunya adalah Kadipaten Blitar yang merupakan wilayah paling timur dari Kesultanan Mataram. Blitar sudah terdapat pusat kota sebelum dibentuknya *gemeente* Blitar dengan adanya alun-alun sebagai pusat kotanya. Kota-kota kuno di Indonesia pada umumnya tumbuh dan berkembang pada sekitar keraton sebagai intinya. Bentuk kota dibangun menurut tata kota tertentu yang secara kosmologis dan magis

religius melambangkan susunan alam semesta. Salah satu yang menjadi ciri khas dari pusat kota dengan tata kota Islam adalah adanya alun-alun sebagai pusat kekuasaan keraton maupun pusat kekuasaan Adipati. Kota Jawa pada zaman prakolonial pada dasarnya menganut pola kota Mandala, sebagai penerusan dari kebiasaan kota-kota pada zaman Hindu Jawa. Kota Jawa di masa lampau mempunyai pusat (inti) kota, yang berupa istana penguasa (Keraton atau Kabupaten) dengan alun-alun dan bangunan penting lain di sekitarnya (Damayanti & Handinoto, 2005).

Terdapat unsur-unsur yang utama pembentuk struktur kota kerajaan Mataram Islam, berupa: *Dalem* Keraton, Alun-alun, Masjid, tempat tinggal Pangeran dan pejabat Keraton, permukiman *Abdi-dalem* dan Pasar. Unsur-unsur kota tersebut, tersusun dalam konsepsi tradisional sakral dan profan (Junianto, 2019). Dalam tata ruang kota kuno di Jawa, *alun-alun* merupakan salah satu elemen penting, ia sebagai pusat kegiatan dan menjadi *landmark* kota. Secara fisik, *alun-alun* berupa tanah lapang yang luas dan selalu berbentuk persegi - mendekati bujur sangkar. Di seputar *alun-alun* itu berdiri bangunan-bangunan penguasa seperti istana, kabupaten, tempat asisten residen, selain tempat ibadah. Di tengah-tengah *alun-alun* biasanya terdapat pohon beringin besar yang dapat memberi suasana teduh dalam aksentuasi ruang yang longgar. Letak kabupaten atau istana selalu memangku *alun-alun*, membelakangi gunung dan menghadap laut. Pohon beringin yang ditanam di halaman keraton atau di *alun-alun* merupakan lambing dari kehidupan; hal ini terkait dengan kepercayaan lama yang menganggap bahwa pohon beringin mempunyai kekuatan istimewa (Ashadi, 2017).

Menurut Wertheim, tata kota dibuat secara tradisional dan direncanakan oleh penguasa yang lebih tinggi. Alun-alun terletak di tengah-tengah kota, sedangkan bangunan-

bangunan terpenting² didirikan di sekitarnya dengan jalan-jalannya yang lurus berpotongan membentuk bujur sangkar (Daliman, 2012a). Pola tata kota tradisional Jawa dapat dikenali dengan melihat denah kota yang mempunyai ciri khas, yaitu di pusat kota terdapat keraton, alun-alun, bangunan-bangunan yang didirikan secara tradisional dan jalan-jalan yang berpotongan membentuk bujur sangkar (Suratno, 2003).

Di Blitar, pendopo kabupaten terletak di utara alun-alun yang menghadap atau memangku alun-alun dan membelakangi gunung, yaitu Gunung Kelud. Sedangkan di alun-alun ditanami pohon beringin. Tidak semua kota kuno yang menganut tata kota Kesultanan Mataram yang masih lestari hingga kini. Blitar adalah salah satunya, yang mana alun-alun masih menjadi pusat berkumpulnya masyarakat dalam bentuk tanah lapang yang berbentuk persegi atau bujur sangkar dengan ditanami pohon beringin sebagai simbol pengayoman³. Di kota-kota lain, alun-alun sudah sangat sulit ditemukan konsep alun-alun seperti tata kota Kesultanan Mataram. Banyak yang sudah disulap menjadi taman kota yang menghilangkan tanah lapang di tengahnya.



Gambar 3. Peta Pusat Kota Blitar 1869-1875

Sumber: Dikutip dari *Blitar Kaart van de Residentie Kediri* yang diolah oleh peneliti

Perkampungan merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur tata kota kuno, sebagai tempat tinggal raja dan pejabat-pejabatnya. Pembagian perkampungan didasarkan atas kedudukan dalam politik atau pemerintahan, atas status sosial, ekonomi, dan agama. (Daliman, 2021). Keberadaan Kampung Kauman dalam tata kota Islam di Jawa tidak dapat dilepaskan dari kawasan sekitar alun-alun yang

merupakan pusat kota. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu tata ruang selain keraton atau pendopo, pasar, maupun penjara, juga selalu terdapat masjid yang berada di sebelah sisi barat dari alun-alun. Di belakang masjid atau di sekitar masjid biasanya terdapat suatu kawasan yang dihuni oleh pejabat agama maupun pengurus masjid beserta keluarganya. Kawasan tersebut dikenal dengan Kampung Kauman atau yang berarti tempat tinggal para kaum. Kata "Kaum" berasal dari bahasa Arab "Qoimuddin" yang bermakna "Penegak Agama". Hampir semua kota lama di Jawa khususnya kota dari bekas Kerajaan Mataram Islam seperti Demak atau Surakarta mempunyai kampung Kauman dengan proses pembentukan yang serupa (Sativa, 2012).

Toleransi masyarakat Kauman sangat tinggi dengan dibuktikan masyarakat Kauman telah berbaur dengan masyarakat di luar lingkungan Kauman bahkan berinteraksi dengan warga kaum yang beretnis Cina (Martono, 2014). Hal ini juga terjadi di Blitar sebelum terbentuknya *Gemeente* Blitar. Dari peta tahun 1869-1875 tersebut dapat dilihat bahwa sudah terdapat perkampungan Cina di kawasan Kauman Kota sekitar alun-alun Blitar yang hingga kini juga masih ada, terutama dalam hal perdagangan yang berbentuk pertokoan. Bahkan sudah terdapat tempat beribadah bagi etnis Cina sejak pra *gemeente* hingga kini menjadi Kota Blitar, yaitu Klenteng Poo An Kiong. Kawasan Pecinan inilah yang kemudian menjadi pusat perdagangan di Kota Blitar hingga kini. Lebih rinci akan dibahas pada pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan *Gemeente* Blitar.

Selain pusat pemerintahan, masjid dan perkampungan, juga terdapat penjara dan pasar yang menjadi ciri khas tata kota Islam Jawa, termasuk di Blitar. Penjara terletak di sebelah timur dari alun-alun Blitar, di mana pada peta tahun 1869-1875 terdapat tulisan *gevangen* yang berarti penjara di sisi timur paseban alun-alun Blitar. Hingga kini, penjara Blitar masih berada di timur alun-alun Blitar. Yang menarik adalah letak pasar di Blitar kurun waktu 1869-1875.

Bangunan penting yang didirikan di sisi barat alun-alun adalah masjid.² Bangunan-bangunan lainnya yang penting adalah pasar dan perkampungan-perkampungan (Daliman, 2012a).

Simbol pohon beringin pun hingga kini masih digunakan sebagai simbol³ pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.

Pasar di Blitar pada sekitar tahun 1869-1875 tidak terletak seperti hari ini. Dari peta tahun 1869-1875 tersebut dapat dilihat bahwa pasar berada di dekat penjara. Kemungkinan lokasi pasar pada saat itu terdapat di daerah Dipoyono jalan Merdeka saat ini yang kini menjadi Blitar Square dan sekitarnya. Lebih rinci akan dibahas pada pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan *Gemeente* Blitar.

Lahirnya *Gemeente* Blitar

Reglement op het Beleid der Regering van Mederlandsch Indie 1854 yang kemudian dijuluki sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, mengatur untuk pertama kalinya struktur administrasi negara kolonial. Sistem pemerintahan Hindia Belanda sangat sentralistik dan otokratik, di mana kekuasaan puncak berada di tangan Gubernur Jenderal (Wibawa, 2001). Jika kita bandingkan kondisi geografis antara Belanda dan Hindia Belanda, sangatlah jauh berbeda, terutama dari segi luasan wilayah. Sistem sentralistik dapat lebih cocok diterapkan di Negeri Belanda, sedangkan apabila diterapkan di seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda dapat dikatakan kurang cocok. Setelah keberhasilan program *Cultuurstelsel*, terjadi perkembangan signifikan yang sangat menguntungkan Belanda terutama dari sisi keuangan negara. Namun berbanding terbalik dengan kondisi Hindia Belanda sebagai penyumbang terbesar kekayaan Belanda. Dengan geografis Hindia Belanda yang luas, dirasa kurang efisien apabila semua pembangunan hanya dipusatkan pada pemerintah pusat Hindia Belanda. Muncullah wacana kebijakan desentralisasi pada akhir abad ke-19 di Hindia Belanda.

Pada awal abad ke-20, semangat baru telah merasuki Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Belanda dengan bertekad untuk menjalankan pemerintahan modern di seluruh Indonesia (Wal, 2001). Dengan berlakunya Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatiewet*) 1903 dan Keputusan

Desentralisasi (*Decentralisatie Besluit*) 1905⁴, pemerintahan lokal dibentuk dan disesuaikan, terbentuklah provinsi (*province*), kabupaten (*regentschap*), kotamadya (*stadgemeente*), dan haminte⁵ golongan (*groepsgemeenteckap*) (Daliman, 2012). Untuk pertama kalinya pemerintah kotamadya dibentuk pada 1905⁶, yang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan kabupaten. Kotamadya dikepalai oleh seorang walikota (*burgermeester*) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal yang dibantu oleh Dewan Kotamadya (*Stadsgemeenteraad*).

Gemeente akan memiliki sifat Barat hingga sampai pada kesimpulan bahwa orang yang tepat untuk jabatan Walikota selalu orang Belanda. Oleh karena dilatar belakangi faktor politik di mana *Stads Gemeente* akan menjadi kantong Barat (*western enclave*) yang prinsip-prinsip pengelolaannya didasari oleh kemandirian masyarakat. Orientasi pembangunan *Gemeente* pun menggunakan dasar dasar filosofi kehidupan masyarakat Barat (Hudiyanto, 2020). Hal tersebut merupakan bentuk pengawasan Gubernur Jenderal di daerah terhadap para kepala daerah yang berasal dari golongan pribumi. Kita ketahui bahwa jabatan tertinggi pejabat daerah dari golongan pribumi hanya sebatas Bupati yang setara dengan Walikota dan juga sama-sama di bawah kontrolir Hindia Belanda secara hierarki kekuasaan. Walaupun terjadi desentralisasi pada kenyataannya kekuasaan tetap bersifat hierarki, di mana Gubernur Jenderal sebagai puncak kekuasaan.

Salah satu kotamadya (*gemeente*) yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah *Gemeente* Blitar. Kota Blitar mulai berstatus *gemeente* (kotamadya) pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan peraturan *Staatsblad van Nederlansche Indie*⁷ No. 150/1906 (Zaenuddin, 2014). 1 April juga merupakan tanggal yang lazim digunakan sebagai tanggal penetapan pembentukan suatu kota di Hindia Belanda. Selain kota Blitar, kota-kota tersebut adalah Bandung, Surabaya, Malang, Kediri, Semarang,

Fase awal desentralisasi bersifat sangat terbatas, karakteristik pemerintah⁴ Hindia Belanda adalah memancar dari pusat, sentralisasi dan hierarkis, bahkan ada yang menyebut desentralisasi tersebut sebenarnya tidak untuk menumbuhkan ekonomi, melainkan untuk mengejar efisiensi bagi pemerintah pusat melalui pengalihan tugas pusat kepada daerah (Wibawa, 2001).

Haminte adalah kota praja atau daerah tingkat III setingkat kota⁵ kecamatan.

Mulai tahun 1905 mulai banyak dibentuk *stads gemeente* namun secara⁶ aturan fungsi, kekuasaan dan struktur pemerintahan baru diberlakukan sejak pemberlakuan *Wet op de Bestuursvorming* (Undang-undang Pembaruan Pemerintahan) 1922.

Lembaran Negara Hindia Belanda⁷

Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, dan Palembang. Namun, tidak semua kota-kota tersebut menjadikan 1 April sebagai hari jadi kota. Kota yang masih menggunakan 1 April sebagai hari jadi kota adalah Kota Bandung, Kota Blitar dan Kota Malang.

Walaupun *Gemeente* Blitar telah terbentuk, namun masih bersifat administrasi pada awal perkembangannya. Menduduki pusat kota Blitar sebagai pusat administrasi *Gemeente* Blitar sebagai penyeimbang kekuasaan Bupati di Blitar. Namun, secara wilayah tidak bisa dilihat seperti apa yang sekarang menjadi wilayah Kota Blitar. Kemungkinan pada awal pembentukan *Gemeente* Blitar masih bersifat administrasi dan pada perkembangan selanjutnya terjadilah beberapa kali pemekaran wilayah yang menjadi wilayah secara batas administrasi seperti Kota Blitar sekarang. Hal yang menjadi menarik kita kaji adalah mengapa pemerintah Hindia Belanda memilih Blitar dibangun menjadi pemerintahan modern berbentuk kota (*Gemeente*), padahal wilayah-wilayah lainnya juga memiliki potensi yang sama untuk dibangun menjadi sebuah kota modern.

Sebagai perbandingan adalah wilayah karisidenan tetangga Blitar, yaitu Karisidenan Pasuruan yang kemudian menjadi Karisidenan Malang. Karisidenan Pasuruan yang memiliki wilayah Pasuruan, Bangil dan Malang dengan Bangil sebagai ibu kotanya. Bangil pada awalnya dipilih menjadi ibu kota salah satunya adalah karena menjadi pusat perdangan yang berkembang pesat di wilayah pesisir dengan memiliki pelabuhan besar otomatis juga menjadi pusat perekonomian. Namun, pada perkembangan selanjutnya Malang yang merupakan daerah pedalaman diproyeksikan untuk perkembangan pembangunan kota sebagai pusat ekonomi baru, yang mana juga dibentuk dan ditetapkan *Gemeente* Malang pada 1 April 1914. Yang menjadi menarik adalah sekitar tahun 1928, ibu kota dari Karisidenan Pasuruan berpindah ke Malang bersamaan berlebarnya Karisidenan Probolinggo menjadi satu bagian Karisidenan Malang yang beribukota di *Gemeente* Malang.

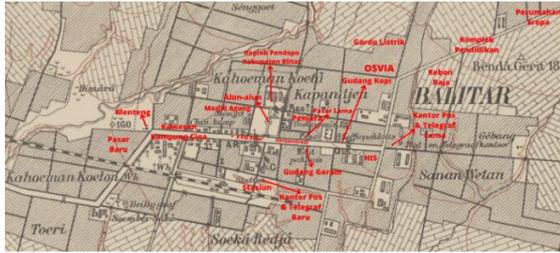
Karisidenan-karisidenan tetangga lainnya, yaitu Karisidenan Madiun maupun Karisidenan Surabaya, tidak banyak yang dibentuk *Gemeente* lebih dari satu *Gemeente*. Karisidenan Kediri sejak awal pembentukannya telah memiliki dua *Gemeente* dengan hari jadi tanggal pembentukan yang sama, yaitu 1 April 1906. Pada umumnya, wilayah karisidenan yang memiliki *gemeente*, selain dijadikan sebagai ibu kota karisidenan, juga diproyeksikan sebagai calon ibu kota karisidenan yang baru sebagai pusat ekonomi baru. Kemungkinan juga hal tersebut juga diproyeksikan di Blitar sebagai pusat ekonomi baru sebagai calon ibu kota karisidenan yang baru pada perencanaan pembentukan karisidenan.

Tahun 1928 bersamaan dengan perpindahan Karisidenan Pasuruan menjadi Karisidenan Malang, Blitar juga pernah dipersiapkan menjadi ibu kota karisidenan Residentie Blitar, namun dikembalikan Residentie Blitar menjadi *Gemeente* Blitar kembali di tahun yang sama dengan dasar *Staatsblad van Nederlansche Indie* Nomor 497 Tahun 1928. Mengapa tidak bertahan lama, kemungkinan belum siapnya sarana prasarana di Blitar⁸. Namun, dapat dianalisis mengapa Blitar pernah diproyeksikan sebagai ibu kota karisidenan adalah secara letak geografis *Gemeente* Blitar dapat dikatakan terletak di tengah wilayah-wilayah lain Karisidenan Kediri.

Perkembangan *Gemeente* Blitar Hingga 1933

Perkembangan tata ruang kota *Gemeente* Blitar, dapat dilihat dan dibandingkan dengan melihat perkembangannya salah satunya adalah dengan memahami letak geografisnya, yaitu dengan melihat peta. Berikut ini adalah lembaran peta khususnya wilayah kota Blitar dari peta Karisidenan Kediri tahun 1968-1875 yang dicetak kembali tahun 1892 dan dianalisis kembali oleh peneliti:

⁸ Kemungkinan belum pulihnya pembangunan sarana prasarana dampak bencana letusan gunung Kelud, terutama pada letusan tahun 1919 yang memporak-porandakan Blitar.



Gambar 4. Peta Blitar 1868-1875 yang dianalisis peneliti.
Sumber: Analisis pribadi peneliti.

Blitar merupakan daerah yang tidak begitu ramai yang sering terdampak erupsi Gunung Kelud yang menutupi kota dengan lumpur mendidih, yang membakar rumah, perkebunan, dan manusia. Apalagi letusan gunung Kelud antara 19-20 Mei 1919, merupakan bencana terbesar dari aktivitas vulkanik gunung Kelud pada abad ke-20 (Cabaton, 2015). Mengutip sejarah laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Santoso, 2023), aliran lahar yang merupakan campuran dari air panas, lumpur, pasir, batubatuan memasuki kota Blitar menciptakan kehancuran yang hebat. Letusan 1919 ini mengakibatkan 104 desa rusak berat, kerusakan sawah, tegal, pekarangan dan perkebunan kopi, tebu dan ketela mencapai 20.200 dan korban binatang sebanyak 1571 ekor. Berikut ini adalah dokumentasi dari KITLV tentang dampak bencana letusan gunung Kelud pada tahun 1919 di pusat kota Blitar:



Gambar 5. *Ingestorte bijgebouwen van de regentswoning (kaboepaten) te Blitar na de uitbarsting van de Keloed Mei 1919*
(Runtuhnya bangunan luar kediaman bupati (kaboepaten) di Blitar pasca letusan Keloed Mei 1919)
(Kawasan Pendopo Kabupaten Blitar, kini jalan Semeru Kota Blitar)
Sumber: KITLV Digital.



Gambar 6. *Door lava en modder vervoeste ringmuur van de gevangenis te Blitar na de uitbarsting van de Keloed 1919*
(Tembok Batas Lapas Blitar Hancur Lava dan Lumpur Pasca Letusan Keloed 1919)
(Terletak di Hereenstraat kini jalan Merdeka)
Sumber: KITLV Digital.



Gambar 7. *Vervuistingen bij het station te Blitar na een uitbarsting van de Keloed op Oost-Java 1919*
(Kehancuran di stasiun Blitar setelah letusan Keloed di Jawa Timur 1919)
Sumber: KITLV Digital.



Gambar 8. *Herstelwerkzaamheden in een straat in de Chinese kamp, vermoedelijk te Blitar, na de uitbarsting van de Keloed op Oost-Java 1919*
(Pekerjaan restorasi di sebuah jalan di kamp Tionghoa, diduga di Blitar, setelah letusan Gunung Keloed di Jawa Timur pada tahun 1919)
Sumber: KITLV Digital.

Perkembangan penduduk Eropa yang bersamaan dengan perluasan sistem pemerintah kolonial lengkap dengan birokrasinya, wajah kota-kota mulai berubah. Pusat kota terutama terdiri atas gedung-gedung pemerintahan dan kediaman pejabat. Kabupaten menghadap alun-

alun dan di sekitarnya terdapat rumah asisten residen atau kontrolir, gedung pengadilan, rumah penjara, gudang garam, kantor pos dan telepon serta rumah pejabat-pejabat, baik pejabat Eropa maupun pribumi (Kartodirdjo, 2014). Perkembangan ekonomi pada akhir abad ke-19 mempunyai dampak pada pembangunan infrastruktur seperti komunikasi, transportasi, edukasi, dan birokrasi yang menjadi perangsang urbanisasi (Kartodirdjo, 2014). Setelah berhasil membentuk *Gemeente* Blitar, Belanda mengaturnya dengan cara-cara dan peraturan secara lebih komprehensif. Atas dasar tersebut di Blitar disediakan kantor-kantor pemerintahan, stasiun kereta api, gardu induk listrik, gereja, kebon raja (taman kota), sekolah, rumah sakit, penataan kota, pembangunan jalan dan irigasi, dan simbol-simbol kota lainnya (Sasmita, 2011).

Perumahan yang dibangun oleh pemerintah *gemeente* berada di Bendogerit, menghadap *De Garoemstraat* (Jalan Raya Garum, pernah menjadi jalan Pahlawan dan sekarang menjadi jalan Soedanco Soeprijadi). Kompleks ini menjadi bagian penting dalam tata ruang yang direncanakan oleh pemerintah, sebab ternyata di Bendogerit pula terkonsentrasi sebagian besar aktivitas penting orang-orang Belanda. Selain dibangun sebagai kompleks pemukiman yang ideal, juga dibangun kompleks pendidikan (dengan didirikannya ELS, HIS, MULO), kompleks susteran, kompleks paroki (lengkap dengan asrama dan gereja), taman kota (Kebon Raja), sarana olahraga, dan rumah dinas pejabat pemerintah, dan OSVIA (Sasmita, 2011). Beberapa dokumentasi tentang hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Assistent-resident J.C. Bedding (1e rij 10e v.l.) bij het 25-jarig bestaan van de Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) te Blitar 1922

(Asisten residen J.C. Bedding (baris ke-1 10 dari kiri) pada peringatan 25 tahun Sekolah Latihan Pegawai Negeri Sipil (OSVIA) di Blitar 1922)

Sumber: KITLV Digital.

Dari judul dokumen foto tersebut dapat diketahui bahwa *Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) di Blitar telah didirikan sejak tahun 1897. Gedung OSVIA Blitar kini digunakan oleh Universitas Negeri Malang sebagai Kampus 3, yang kini beralamat di jalan Ir. Soekarno Nomor 1 Blitar. Menarik untuk diteliti adalah mengapa pemerintah Hindia Belanda mendirikan OSVIA di Blitar, malah tidak berada di ibu kota karisidenan yaitu Karisidenan Kediri. Selain OSVIA, tidak jauh dari gedung OSVIA juga didirikan kompleks pendidikan, selain pendidikan umum juga pendidikan khusus agama Katolik, yaitu Kesusteran. Kompleks pendidikan umum yang dimaksud adalah kompleks pendidikan yang sekarang menjadi beberapa sekolah menengah pertama (pernah digunakan sebagai kompleks SMP Negeri, yaitu: SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, dan SMPN 11) dan sekolah menengah kejuruan (dulu SMPN 11 sekarang menjadi SMKN 3 Blitar) dan pernah menjadi kamp militer Pembela Tanah Air (PETA) pada zaman Pendudukan Jepang. Kompleks tersebut berada di selatan jalan. Sedangkan di utara jalan terdapat kompleks pendidikan khusus agama Katolik, yang kini dikenal dengan Biara Roh Kudus dan Yayasan Pendidikan Santa Maria Blitar. Berikut ini adalah dokumentasinya:



Gambar 10. Woning van de directeur der inlandse onderwijzers te Blitar sekitar 1900

(Rumah direktur guru pribumi di Blitar sekitar tahun 1900) Sekarang menjadi gedung TU & Kepala SMKN 3 Blitar
Sumber: KITLV Digital



Gambar 11. Voedsel en kledingverstrekking in de muziekkapel van de sociëteit te Blitar na de uitbarsting van de Keloed 1919 (Pembagian sembako di kapel musik masyarakat di Blitar pasca letusan Keloed 1919)
Sumber: KITLV Digital.

Dari dokumentasi tersebut terlihat posisi kapel berhadapan dengan rumah dinas direktur guru pribumi, kemungkinan bangunan tersebut berada di antara Biara Roh Kudus dan SDK Santa Maria saat ini. Masih di jalan yang sama (*De Garoemstraat*), berjalan ke arah timur merupakan kompleks perumahan bergaya Indies, kemungkinan merupakan kompleks perumahan orang-orang Belanda kala itu. Hingga saat ini, masih terawat dan tidak banyak perubahan berjajar perumahan-perumahan bergaya Indies di sepanjang jalan tersebut, namun berbeda fungsi dan kepemilikan. Salah satunya adalah timur sekolah kompleks yang kini dijadikan rumah Wisma Komandan Kodim 0808 Blitar.

Tidak jauh dari kompleks pendidikan pada *De Garoemstraat*, jalan samping rumah dinas direktur guru pribumi ke selatan yang sekarang bernama jalan Diponegoro, terdapat taman kota yang dikenal dengan Kebon Raja (Kebon Rojo, pernah diganti nama menjadi Kebon Rakyat pada masa Otonomi Daerah namun dikembalikan lagi dengan nama Kebon Rojo) yang berada di depan Gereja Katolik Santo Yusup yang memiliki ciri khas menara tinggi dengan beratap berbentuk tumpang lancip segitiga. Komplek taman kota atau Kebon Raja merupakan satu kawasan yang terdiri dari rumah dinas pejabat yang sekarang menjadi rumah dinas Walikota Blitar yang berada di utara Kebon Raja dan sarana olah raga yang berada di selatan Kebon Raja yang sekarang digunakan untuk olah raga badminton dan tenis GOR Sasana Krida Kota Blitar. Berikut ini adalah salah satu dokumentasi taman kota Kebon Raja:



Gambar 12. Vijver bij stadstuin te Blitar sekitar 1920 (Telaga di taman kota di Blitar sekitar tahun 1920)
Sumber: KITLV Digital.

Beberapa industri yang berkembang di *Gemeente Blitar* antara lain industri pengolahan (manufaktur) berupa pabrik minyak di Sukorejo dan Pakunden, industri jasa transportasi (kereta api), jasa telekomunikasi (pos, telegraf, dan telepon), industri konstruksi (perumahan, perkantoran), dan *utility* (pasar, rumah sakit, listrik, air minum) (Sasmita, 2011). Stasiun Blitar diresmikan pada 16 Juni 1884 sebagai bagian dari pembangunan jalur ruas Tulungagung-Blitar oleh *Staatsspoorwegen*, kemudian jalur dari Blitar menuju Malang terhubung sepenuhnya oleh jalur kereta api pada tahun 1896. Namun, pada tahun 1919 stasiun Blitar lumpuh total akibat letusan gunung Kelud. Berikut ini adalah penampakan jalan menuju Stasiun Blitar pada sekitar tahun 1905:



Gambar 13. Station te Blitar, gebouwd in 1884 (Stasiun Blitar, dibangun tahun 1884)
Sumber: KITLV Digital

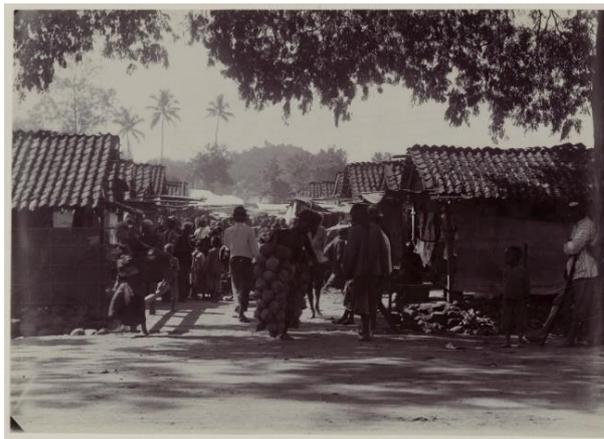
Jasa telekomunikasi (pos dan telegraf) pada awalnya tidak berada di utara Stasiun Blitar seperti PT Pos Blitar sekarang. Dari peta yang ditemukan, kemungkinan Kantor Pos dan Telegraf masih menjadi satu di daerah yang kini

digunakan menjadi PLN Blitar dan Telkom Blitar (dapat dilihat di peta). Kemudian, untuk mempermudah pengiriman maupun komunikasi, dibangunlah dan dipindah di utara Stasiun Blitar. Berikut ini adalah dokumentasi Kantor Pos dan Telegraf Blitar yang telah berada di utara Stasiun Blitar pada tahun 1930 yang masih menghadap ke arah barat jalan utama menuju Stasiun Blitar:



Gambar 14. Post- en telegraafkantoer te Blitar sekitar 1930
(Kantor pos dan telegraf di Blitar sekitar tahun 1930)
Sumber: KITLV Digital.

Pasar di Blitar, apabila dilihat dari peta pada abad ke-19 belum menetap. Pasar kota pada awalnya terletak di sekitar alun-alun, dekat dengan penjara dan dekat dengan gudang garam. Kemungkinan pasar lama Blitar terletak di daerah yang dulunya pernah dibangun Dipayana yang kini menjadi Blitar Square. Hal yang menguatkan analisis tersebut adalah tata ruang kota Mataram Islam yang salah satunya terdapat pusat perekonomian yaitu pasar. Namun pada perkembangan selanjutnya dengan berbaurkan berbagai etnis di Blitar terutama etnis Cina dengan kaum pribumi, berkembanglah pusat perekonomian berupa pasar di sekitar kampung Cina. Tidak hanya pasar namun juga didirikan Klenteng sebagai tempat beribadah etnis Cina. Pasar yang dimaksud walaupun belum permanen seperti sekarang kemungkinan berada di Pasar Legi sekarang yang tidak jauh dari Klenteng. Berikut ini adalah dokumentasi pasar baru di Blitar sekitar tahun 1925 dan Klenteng Blitar sekitar tahun 1920:



Gambar 15. Pasar te Blitar, Oost-Java 1925
(Pasar di Blitar, Jawa Timur 1925)
Sumber: KITLV Digital.

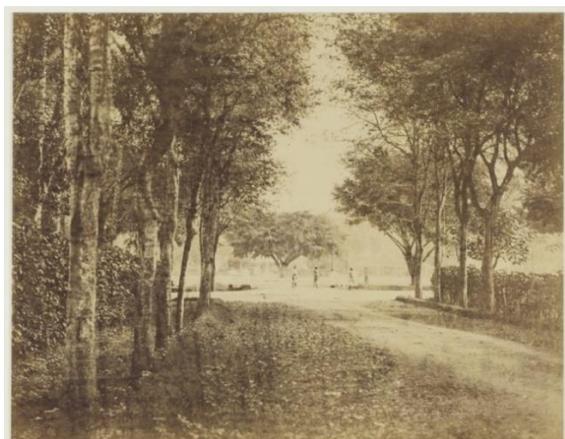


Gambar 16. Chinese tempel te Blitar 1920
(Klenteng Cina di Blitar sekitar 1920)
Sumber: KITLV Digital.

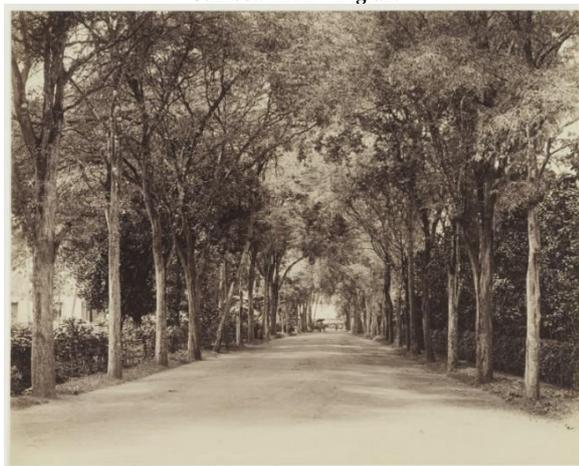
Sampai 1923 jalan raya di *Gemeente* Blitar telah dapat menghubungkan daerah di luarnya, lengkap dengan pemberian nama dan kelas jalan (Sasmita, 2011). Salah satu jalan utama di Blitar adalah jalan raya sebelah selatan alun-alun Blitar. Di peta, jalan yang paling besar adalah jalan di sebelah selatan alun-alun Blitar yang menghubungkan dari timur sejak kantor Pos dan Telegraf lama hingga kawasan pasar baru yang menjadi pusat perekonomian baik pasar maupun pertokoan yang didominasi oleh etnis Cina pada daerah sekitar pasar atau sebelah barat (kini jalan merdeka barat dahulu *pasarstraat* atau jalan pasar). Sedangkan jalan raya selatan alun-alun bernama *Heerenstraat* (jalan Hereen) yang kini menjadi jalan Merdeka Blitar. Penamaan *Heerenstraat* sudah umum digunakan pada kota-kota Hindia Belanda sebagai jalan utama atau jalan protokol suatu kota. Pada umumnya *Heerenstraat* merupakan kawasan elit dan pusat bisnis. Berikut adalah beberapa dokumentasi jalan raya di Blitar:



Gambar 17. *Straat te Blitar* (Jalan di Blitar) sekitar tahun 1880, kemungkinan *Heerenstraat* di selatan alun-alun.
Sumber: KITLV Digital.



Gambar 18. *Aloen-aloen te Blitar* (Alun-alun Blitar) sebelum tahun 1880, kemungkinan adalah jalan ke selatan dari alun-alun Blitar, yang kini bernama jalan Kenanga.
Sumber: KITLV Digital.



Gambar 19. *Laan te Blitar* (Jalan di Blitar) sekitar tahun 1900, kemungkinan adalah jalan alun-alun Blitar ke selatan, sekarang bernama jalan Kenanga.
Sumber: KITLV Digital.



Gambar 20. *Kotaweg te Blitar* (Jalan Raya di Blitar) sekitar tahun 1900, dari bentuk jembatan dan sungai kecilnya, kemungkinan jalan raya utara Stasiun Blitar yang kini bernama jalan Mastrip.
Sumber: KITLV Blitar.

Salah satu penunjang perkembangan perekonomian di Blitar, terdapat tiga hotel di *Gemeente* Blitar yang dikenal sebagai hotel berkelas untuk daerah itu, yakni Hotel Chemin de Fer, Hotel Van Rheedeen, dan Hotel Centrum (Sasmita, 2011). Hotel-hotel tersebut kemungkinan berada di pusat kota. Namun, tentang letak dan kegunaan bangunan hotel-hotel tersebut masih dalam kajian, terutama dari dokumen foto yang ditemukan, belum dapat dicocokkan dengan yang ada sekarang (kemungkinan direnovasi maupun diganti dengan bangunan baru, sehingga tim peneliti belum bisa memastikan dan belum berani menyajikan). Banyak hotel yang berdiri di Blitar, namun yang paling terkenal dan menjadi ciri khas Blitar adalah tiga hotel tersebut. Hotel Chemin de Fer, masih menjadi kajian, kemungkinan sekarang menjadi gedung BNI 46 Cabang Blitar yang berada di jalan Kenanga Kota Blitar sekarang. Hotel Van Rheedeen terletak di Heerenstraat (sekarang jalan A. Yani), masih menjadi kajian, kemungkinan sekarang sekitar DPRD Kabupaten Blitar yang lama, Kodim 0808 & Bank BRI Cabang Blitar. Hotel Centrum berada di Heerenstraat, kemungkinan adalah Hotel Tugu Sri Lestari Blitar yang menjadi langganan menginap baik pejabat maupun tokoh-tokoh publik apabila berkunjung ke Blitar, termasuk Presiden Republik Indonesia yang pertama Ir. Soekarno, bahkan terdapat kamar khusus untuk beliau hingga kini.

Sebagai penunjang kemajuan kota, listrik merupakan suatu kebutuhan primer masyarakat kota. Blitar dipasang pada 1933 oleh NIWEM

(*Nederlandsch Indie Waterkracht en Elektriciteit Maatschappij*) dengan sebuah gardu listrik (Sasmita, 2011). Gardu induk listrik tersebut kini masih berdiri kokoh walaupun kini secara pemanfaatan sudah dipindah dan dibangun gardu induk Blitar di jalan yang sama namun berbeda tempat, yaitu di jalan Ir. Soekarno nomor 140 Sentul Blitar. Gardu induk listrik pertama di Blitar tersebut masih berdiri dan meninggalkan bekas-bekas bangunan untuk penyimpanan listrik berupa travo dan sutet, namun sudah tidak difungsikan sebagai gardu listrik. Gardu listrik pertama di Blitar ini terletak di jalan Ir. Soekarno sekarang, tepatnya berada di utara dari OSVIA Blitar (Kampus 3 Universitas Negeri Malang), tepatnya berada di tikungan arah Pusat Informasi dan Pelataran Parkir Makam Bung Karno Blitar. Berikut adalah dokumentasi gardu listrik Blitar pertama yang menerima pasokan listrik dari jaringan listrik Surabaya:



Gambar 21. *Elektriciteitsvoorziening van Soerabaja 1933*
(Pasokan listrik Surabaya 1933)
Sumber: KITLV Digital

Kesimpulan

Blitar berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno Nusantara hingga kini tentu telah mengalami perubahan wajah kota. Alun-alun yang menjadi ciri khas pusat kota suatu wilayah, kini masih dilestarikan di Blitar dengan mencirikan tata kota Islam Kesultanan Mataram. Daerah Kepanjenlor Blitar dipilih sebagai pusat kota Blitar oleh Kabupaten Blitar juga dikembangkan dan dipilih menjadi pusat pemerintahan *Gemeente* Blitar yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda sejak awal abad ke-20. Pusat kota Blitar berkembang dan menjadi Kota Blitar seiring dengan perencanaan dan pembangunan Blitar sebagai *gemeente* sekaligus

pernah diproyeksikan sebagai Karisidenan Blitar. Namun, salah satu yang menjadi kendala pembangunannya adalah bencana geologi letusan gunung Kelud, terutama letusan tahun 1919 telah memporak-porandakan berbagai infrastruktur di pusat kota Blitar.

Pada Karisidenan Kediri, hanya terdapat dua wilayah yang dibentuk kota (*gemeente*) yaitu ibu kota Karisidenan Kediri dengan *Gemeente* Kediri dan *Gemeente* Blitar yang diproyeksikan menjadi Karisidenan Blitar. Salah satu hal yang menarik adalah telah didirikannya sekolah pamong praja di Blitar, yaitu *Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) di Blitar telah didirikan sejak tahun 1897. Hal tersebut berarti telah ada perencanaan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebelum membentuk *Gemeente* Blitar telah mempersiapkan fasilitas pendukung, salah satunya adalah sumber daya manusia. Perkembangan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Blitar, terutama berbaurnya berbagai etnis di Blitar menjadikan pusat kota Blitar berkembang menjadi pusat perekonomian di Blitar. Etnis Cina di Blitar menjadi salah satu faktor berkembangnya pasar dan pertokoan di Blitar.

Selain perkembangan pusat perekonomian berupa pasar dan pertokoan, pembangunan infrastruktur berupa jalur-jalur perhubungan, transportasi termasuk kereta api, komunikasi, pendidikan, perumahan dan permukiman orang-orang Eropa menjadi tanda bahwa Blitar memang sengaja dibangun menjadi pusat perekonomian baru di Karisidenan Kediri. Apalagi dengan banyaknya perkebunan di wilayah Kabupaten Blitar, dengan dibukanya jalur perhubungan baik jalan raya maupun kereta api, serta listrik di Blitar menjadikan kemajuan industrialisasi di Blitar. Namun sayangnya, dokumen-dokumen era tersebut masih bersifat terbatas dan langka. Apalagi dengan masifnya pembangunan yang mengubah bahkan menghilangkan bangunan cagar budaya, menjadikan wajah Blitar lama menjadi hilang tanpa adanya penanda.

Daftar Pustaka

Ashadi. (2017). Alun-Alun Kota Jawa. In *Arsitektur UMJ Press* (Issue September). <https://www.researchgate.net/profile/As>

hadi-

Ashadi/publication/319442164_ALUN-ALUN_KOTA_JAWA/links/59aa1d60a6fdcce55a2fd268/ALUN-ALUN-KOTA-JAWA.pdf

- Cabaton, A. (2015). *Jawa, Sumatra, dan kepulauan lain Di Hindia Belanda*. Penerbit Ombak.
- Daliman, A. (2012a). *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam Di Indonesia*. Penerbit Ombak.
- Daliman, A. (2012b). *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX Yogyakarta: Ombak*. Penerbit Ombak.
- Damayanti, R., & Handinoto. (2005). Kawasa "Pusat Kota" Dalam Perkembangan Sejarah. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 33(1), 34-42.
- Hudiyanto, R. (2020). Dari Kota Mancanegara Timur Hingga Gemeente: Perkembangan Kota Pasca Pemberlakuan Uu Desentralisasi 1903. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 14(2), 80.
<https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p80-97>
- Junianto. (2019). Konsep Mancapat-Mancalima dalam Struktur Kota. *MINTAKAT Jurnal Arsitektur*, 20(2), 107-131.
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pengantar sejarah Indonesia baru : sejarah pergerakan nasional*. Penerbit Ombak.
- Martono, D. E. (2014). *Sejarah Kampung Kauman Semarang (Menguak Sisi Sosial dan Ekonomi) Tahun 1992-2012*. Universitas Negeri Semarang.
- Munoz, P. M. (2009). *Kerajaan-kerajaan awal Kepulauan Indonesia dan semenanjung Malaysia*. Penerbit Mitra Abadi.
- Santoso, G. D. T. (2023). *Sejarah Meletusnya Gunung Kelud*.
<https://vsi.esdm.go.id/profile/sejarah>
- Sasmita, N. (2011). Industrialisasi Di Gemeente Blitar, 1900-1942. *Citra Lekha*, 15(2), 1-18.
- Sativa. (2012). Konsep Teritori Kampung Kauman Yogyakarta. In *Inersia: Vol. VIII* (Issue 2, pp. 110-116).
- Wal, S. L. Van der. (2001). *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*. Djambatan.
- Wibawa, S. (2001). *Negara-Negara Nusantara-Dari Negara Kota hingga Negara Bangsa dari Modernisasi hingga Reformasi Administrasi*. Gadjah Mada University Press.
- Zaenuddin, H. M. (2014). *Asal-usul Kota-kota Di Indonesia Tempo Doeloe*. Penerbit Change.

